

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JOMBANG PERIODE 2005–2024

Kharisma Tri Buana Dewi¹, Renny Oktafia²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

(kharismatri.upnjatim@gmail.com¹, RennyOktafia.upnjatim@gmail.com²)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang selama 2005–2024 dalam konteks desentralisasi fiskal. Urgensi penelitian muncul dari tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Data yang digunakan berupa data sekunder deret waktu dari Kementerian Keuangan dan dokumen keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan regresi linier berganda setelah melalui uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, menunjukkan kontribusi PAD terhadap kapasitas belanja masih terbatas. DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan, menegaskan dominasi aliran transfer pusat terhadap belanja daerah. DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sesuai karakteristik penggunaannya yang telah ditentukan. DBH berpengaruh positif dan signifikan, memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah. Secara simultan, keempat variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, menggambarkan struktur fiskal Kabupaten Jombang dibentuk oleh kombinasi pendapatan sendiri dan dana transfer. Temuan ini juga memperkuat fenomena flypaper effect, di mana belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer dibanding PAD. Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran.

Kata Kunci: PAD; DAU; DAK; DBH; Belanja Daerah; Desentralisasi Fiskal; Flypaper Effect

Abstract

This study analyzes the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Regional Expenditure of Jombang Regency during 2005–2024 within the context of fiscal decentralization. The urgency of this research arises from the region's high dependence on central government transfers and the need to enhance regional fiscal capacity independently. The data used are secondary time series data obtained from the Ministry of Finance and regional government financial documents. The analysis was conducted using multiple linear regression after passing classical assumption tests to ensure model validity. The results indicate that PAD has a positive but insignificant effect on Regional Expenditure, suggesting that its contribution to expenditure capacity remains



limited. DAU has a positive and significant effect, confirming the dominance of central government transfers on regional spending. DAK also has a positive but insignificant effect, consistent with its predetermined usage. DBH has a positive and significant effect, providing additional fiscal space for the local government. Simultaneously, all four variables significantly influence Regional Expenditure, illustrating that Jombang Regency's fiscal structure is shaped by a combination of own-source revenue and transfer funds. These findings also reinforce the flypaper effect phenomenon, where regional expenditure is more influenced by transfer funds than PAD. This study is expected to provide insights for local governments to enhance fiscal independence and optimize budget management.

Keywords: PAD; DAU; DAK; DBH; Regional Expenditure; Fiscal Decentralization; Flypaper Effect

A. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya, meningkatkan mutu pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah melalui sistem transfer fiskal yang lebih adil. Dalam kerangka tersebut, desentralisasi fiskal tidak hanya berperan sebagai alat distribusi keuangan, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kemampuan fiskal daerah melalui peningkatan kemandirian, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebutuhan belanja secara lebih efektif dan responsif sesuai dengan

kondisi sosial-ekonomi wilayah masing-masing.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari dua dekade, tingkat ketergantungan sebagian besar daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan bahwa sekitar 80 persen daerah di Indonesia memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil terhadap total pendapatan. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah karena keterbatasan PAD membuat pemerintah daerah kurang bebas dalam menentukan prioritas pembangunan. Di sisi lain, dominasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam struktur pendapatan menyebabkan kondisi fiskal daerah menjadi kurang stabil dan tidak cukup responsif terhadap perubahan ekonomi lokal. Pola seperti ini sering menimbulkan fenomena flypaper effect, yaitu ketika belanja daerah lebih dipengaruhi oleh



dana transfer daripada kemampuan PAD daerah itu sendiri.

Belanja daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sosial. Kualitas belanja dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri maupun memanfaatkan transfer fiskal secara efektif. Teori ekonomi publik, termasuk teori Wagner dan hukum Peacock & Wiseman, menegaskan bahwa belanja pemerintah akan meningkat seiring meningkatnya kebutuhan layanan publik dan kemampuan fiskal negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, meningkatnya PAD atau transfer fiskal seharusnya mendorong peningkatan belanja yang produktif. Akan tetapi, kondisi di berbagai daerah menunjukkan bahwa peningkatan belanja tidak selalu diikuti dengan peningkatan PAD, sehingga terjadi ketidakseimbangan fiskal horizontal antar daerah.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang menarik untuk dikaji karena memiliki perkembangan fiskal yang fluktuatif selama dua dekade terakhir. Pertumbuhan PAD Kabupaten Jombang tidak berjalan konsisten, sementara peran DAU dan DBH masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Beberapa laporan APBD menunjukkan bahwa proporsi DAU

menjadi sumber pendanaan belanja terbesar, sementara PAD masih belum mampu menopang kebutuhan pembiayaan daerah secara optimal. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme desentralisasi fiskal dan realitas kapasitas fiskal daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah untuk memahami sejauh mana struktur pendapatan mampu mendorong kualitas belanja di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan kajian teoritis, PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Menurut teori *fiscal federalism*, daerah dengan PAD tinggi memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengalokasikan belanja berdasarkan prioritas pembangunan lokal. Namun, Fatimah et al. (2020) dan Wulandari et al. (2025) menunjukkan bahwa PAD di beberapa daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah karena kontribusinya yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan basis pajak dan retribusi secara maksimal. Sebaliknya, penelitian oleh Syafira Putri & Kurnia (2024) menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di daerah yang memiliki struktur ekonomi kuat dan kapasitas pengelolaan fiskal yang baik. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD dalam mendorong belanja daerah sangat



bergantung pada karakteristik dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk transfer blok yang dirancang untuk menciptakan pemerataan kapasitas keuangan antardaerah. Berdasarkan teori equalizing grant, DAU idealnya membantu daerah dengan kapasitas fiskal rendah agar mampu menyediakan layanan publik secara setara. Temuan penelitian Eliana et al. (2023) dan Syafira Putri & Kurnia (2024) secara konsisten menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Jombang, masih sangat bergantung pada DAU sebagai sumber pembiayaan utama. Ketergantungan yang tinggi terhadap DAU juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi perubahan dalam kebijakan anggaran pemerintah pusat.

DAK memiliki karakteristik berbeda karena penggunaannya diarahkan untuk program prioritas tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Studi oleh (Heliyanto & Handayani (2016) dan Purnasari et al (2022) menunjukkan bahwa DAK tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah secara keseluruhan karena sifatnya yang terikat. Namun, menemukan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini mempertegas bahwa pengaruh DAK harus dianalisis

berdasarkan konteks penggunaan anggarannya.

DBH merupakan komponen pendapatan yang dibagikan kepada daerah berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan nasional. Beberapa penelitian seperti Eliana et al (2023) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, terutama di daerah yang menerima DBH cukup besar dari sektor pajak atau sumber daya alam. DBH memberikan fleksibilitas lebih besar kepada daerah dibandingkan DAK, sehingga efeknya terhadap belanja cenderung lebih kuat.

Sintesis dari berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja daerah, sementara DAU dan DBH cenderung memiliki pengaruh yang stabil dan signifikan. Kesenjangan temuan tersebut menandakan pentingnya melakukan penelitian ulang pada konteks daerah yang berbeda, termasuk Kabupaten Jombang, untuk memahami bagaimana struktur pendapatan daerah memengaruhi belanja dari perspektif empiris. Selain itu, temuan-temuan terdahulu belum banyak yang mengkaji secara komprehensif dalam rentang waktu panjang seperti 20 tahun, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan data deret waktu 2005–2024. Untuk mengkaji pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang



secara simultan maupun parsial untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai struktur fiskal daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur fiskal daerah serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

1. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berfokus pada pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih akurat mengenai preferensi masyarakat lokal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang terdesentralisasi dapat menciptakan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Richard A. Musgrave (1989) menjelaskan bahwa fungsi keuangan pemerintah mencakup tiga hal utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konteks desentralisasi, fungsi alokasi lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal, sementara fungsi distribusi dan stabilisasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal diwujudkan melalui

transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan memperkuat kapasitas pembangunan daerah (Aldo Yanuarto et al., 2024).

Secara empiris, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, akuntabilitas daerah, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, ketergantungan terhadap transfer pusat, serta rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber PAD secara optimal. Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah, kemampuan fiskal, dan transparansi pengelolaan anggaran (Santika et al., 2025).

2. Teori Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan konsep yang menjelaskan perilaku pemerintah daerah dalam merespons dana transfer dari pemerintah pusat. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) yang menyatakan bahwa dana transfer cenderung “menempel” pada belanja publik daerah, artinya peningkatan transfer dari pusat lebih banyak mendorong belanja daerah dibandingkan peningkatan PAD dalam jumlah yang sama. Fenomena ini dapat terjadi karena tiga faktor utama. Pertama, *asymmetric*



information, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai sumber pendapatan daerah. Kedua, *fiscal illusion*, di mana masyarakat tidak sepenuhnya menyadari bahwa dana transfer juga berasal dari pajak yang mereka bayar, sehingga tekanan terhadap efisiensi penggunaan dana menjadi lebih rendah. Ketiga, *bureaucratic behavior*, yaitu kecenderungan aparaturnya pemerintah daerah menggunakan dana transfer secara lebih longgar karena dianggap sebagai “dana tambahan” yang tidak menimbulkan beban politik langsung (Hines & Thaler, 1995).

Dalam konteks Indonesia, fenomena *flypaper effect* masih banyak ditemukan. Daerah yang memperoleh transfer besar dari pusat cenderung memiliki belanja publik yang lebih tinggi, sementara kemampuan PAD-nya relatif stagnan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dana transfer belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kemandirian fiskal. Penelitian Fitrianti et al. (2025) dan Jannah (2020) menunjukkan bahwa DAA memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah dibanding PAD, yang memperkuat bukti terjadinya *flypaper effect*. Oleh karena itu, penguatan PAD menjadi kunci utama untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori pengeluaran pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang

memengaruhi peningkatan belanja publik. Salah satu teori klasik yang relevan adalah Hukum Wagner, yang menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional per kapita, pengeluaran pemerintah akan meningkat secara proporsional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Eliana et al., 2023).

Selain itu, Hipotesis Peacock dan Wiseman (1961) menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sering kali dipengaruhi oleh *displacement effect* dan *inspection effect*. *Displacement effect* terjadi ketika krisis ekonomi atau kondisi darurat menyebabkan pemerintah menaikkan pengeluaran publik dan tarif pajak, dan setelah krisis berakhir, tingkat pengeluaran tidak kembali ke kondisi semula. Sementara itu, *inspection effect* terjadi ketika masyarakat menyadari pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, sehingga permintaan terhadap pengeluaran pemerintah meningkat secara permanen.

Teori cost disease yang dikemukakan Baumol (1967) juga relevan, di mana sektor-sektor jasa publik seperti pendidikan dan kesehatan memiliki produktivitas rendah namun membutuhkan biaya tinggi. Akibatnya, belanja pemerintah pada sektor-sektor tersebut meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks daerah, peningkatan pengeluaran publik



sering kali diarahkan untuk belanja modal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Jombang pada periode 2005–2024. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu menyediakan bukti empiris melalui data numerik yang objektif dan terukur. Fokus lokasi penelitian berada di Kabupaten Jombang, sementara jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk deret waktu yang dihimpun dari DJPK Kementerian Keuangan dan BPS.

Populasi penelitian mencakup seluruh data keuangan Kabupaten Jombang selama dua dekade, dengan sampel berupa data tahunan dari variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah. Variabel dependen yang dianalisis adalah Belanja Daerah, sedangkan variabel independennya terdiri atas PAD, DAU, DAK, dan DBH. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

Sebelum melakukan uji hipotesis, model dianalisis terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik meliputi uji normalitas,

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Setelah itu dilakukan uji F untuk menilai pengaruh variabel bebas secara simultan, uji t untuk menilai pengaruhnya secara parsial, serta perhitungan koefisien determinasi (R^2) guna melihat seberapa besar variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi statistik SPSS agar hasil analisis lebih akurat dan reliabel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diterapkan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi karakteristik BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga parameter yang dihasilkan bersifat tidak bias, efisien, serta konsisten. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan mencakup empat jenis pemeriksaan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa residual pada model regresi mengikuti pola distribusi normal. Distribusi residual yang normal menjadi salah satu indikator penting bahwa model regresi layak digunakan dan hasil estimasinya dapat dipercaya. Pada penelitian ini, pengujian normalitas



residual dilakukan dengan memanfaatkan metode Kolmogorov–Smirnov (K–S).

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas	
N	20
Sig (2-tailed)	0,200

Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, residual dalam model dapat dinyatakan berdistribusi normal karena nilai signifikansinya melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Uji Multikolineritas

Pengujian multikolineritas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) untuk setiap variabel bebas. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolineritas apabila nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah angka 10. Sebaliknya, apabila Tolerance memiliki nilai kurang dari 0,10 atau VIF melebihi 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala multikolineritas antarvariabel independen dalam model.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas		
	Tolerance	VIF
PAD	0,105	9,563
DAU	0,185	5,412
DAK	0,204	4,913
DBH	0,297	3,367

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada tabel *Coefficients*, diperoleh nilai Tolerance masing-masing

variabel independen, yaitu PAD sebesar 0,105, DAU sebesar 0,185, DAK sebesar 0,204, dan DBH sebesar 0,297. Sementara itu, nilai VIF tercatat sebesar 9,563 untuk PAD, 5,412 untuk DAU, 4,913 untuk DAK, dan 3,367 untuk DBH. Mengacu pada kriteria pengujian multikolineritas, suatu model dinyatakan bebas dari masalah multikolineritas apabila Tolerance berada di atas 0,10 dan VIF berada di bawah angka 10. Dengan demikian, berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen dalam model tidak ditemukan indikasi terjadinya multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser. Teknik ini dilakukan dengan meregresikan nilai residual absolut terhadap setiap variabel bebas dalam model. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: apabila nilai signifikansi (Sig.) dari hasil regresi lebih besar dari 0,05, maka model dinyatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05, hal tersebut mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas	
	Sig
PAD	0,200
DAU	0,740
DAK	0,155
DBH	0,285



Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel Coefficients, seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) di atas 0,05, yakni PAD sebesar 0,200, DAU sebesar 0,740, DAK sebesar 0,155, dan DBH sebesar 0,285. Karena setiap variabel memiliki nilai Sig. yang melebihi batas 0,05, dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, pola penyebaran datanya bersifat homoskedastis atau varians residualnya konstan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya keterkaitan antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam suatu model regresi. Masalah ini biasanya muncul pada data runtut waktu karena nilai suatu variabel pada masa kini cenderung dipengaruhi oleh nilai pada masa lampau. Dalam model regresi yang ideal, autokorelasi tidak boleh terjadi, sebab keberadaan pola hubungan pada residual menunjukkan bahwa error tidak bersifat acak. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan estimasi parameter menjadi kurang efisien dan menurunkan kualitas model.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi
Durbin Watson
1,873

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Durbin-Watson sebesar 1,873 dengan batas atas (dU) sebesar 1,8283. Karena

angka tersebut berada di dalam rentang dU hingga (4 – dU), yaitu $1,8283 < 1,873 < 2,1717$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Artinya, residual bersifat acak dan tidak saling berkaitan antarperiode, sehingga model regresi yang digunakan memenuhi asumsi independensi dan layak dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model regresi linier berganda terhadap data *time series* periode 2005–2024, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -257,685 + 1,033PAD + 1,595DAU + 1,762DAK + 0,249DBH + \varepsilon$$

Uji R

Tabel 5 Hasil Uji R

Uji Koefisien Determinasi	
R Square	R
0,965	0,986

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,965 mengindikasikan bahwa sebesar 96,5% variasi Belanja Daerah dapat diterangkan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH. Adapun 3,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti Dana Insentif Daerah (DID), jenis transfer fiskal lainnya, maupun kondisi makroekonomi daerah yang tidak dianalisis secara spesifik dalam penelitian.

Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F



Uji F	
F	Sig
130,863	0.000

Hasil pengujian simultan melalui uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 130,863 dengan signifikansi 0,000 yang berada di bawah batas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dinyatakan memadai dan mampu menggambarkan hubungan antara komponen pendapatan daerah dan belanja daerah sepanjang periode penelitian.

Uji t

Tabel 7 Hasil Uji t

Uji t				
	B	B	t	sig
Konstanta	-		-1,170	0,260
	257,685			
PAD	1,033	0,254	1,950	0,076
DAU	1,595	0,430	4,284	0,001
DAK	1,762	0,342	3,577	0,003
DBH	0,249	0,020	0,248	0,807

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat dijelaskan sebagai berikut

Hasil uji t menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh yang berbeda terhadap Belanja Daerah, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nilai koefisien PAD sebesar 1,033 dengan $t = 1,950$ dan signifikansi 0,076 ($> 0,05$), menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja

Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD belum mampu mendorong pertumbuhan belanja secara signifikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa potensi PAD Kabupaten Jombang masih terbatas, terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi yang kontribusinya relatif kecil terhadap total pendapatan daerah. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Purnasari et al. (2022) yang menyatakan bahwa di banyak daerah, PAD belum menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi belanja publik karena masih rendahnya kemandirian fiskal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU memiliki koefisien sebesar 1,595 dengan nilai $t = 4,284$ dan signifikansi 0,001 ($< 0,05$), menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. DAU merupakan dana transfer terbesar yang diterima oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah seperti gaji pegawai dan pelayanan publik dasar. Hasil ini memperkuat konsep *flypaper effect*, dimana pemerintah daerah cenderung membelanjakan dana transfer dari pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan sendiri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitrianti et al. (2025) yang menemukan bahwa DAU memiliki elastisitas tinggi terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)



DAK memiliki koefisien 1,762 dengan nilai $t = 3,577$ dan signifikansi 0,003 ($< 0,05$), yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sebagai dana transfer yang bersifat *earmarked*, DAK digunakan untuk membiayai kegiatan spesifik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Dengan meningkatnya DAK, alokasi belanja daerah otomatis meningkat, terutama pada belanja modal. Hasil ini sejalan dengan temuan Syafira Putri & Kurnia (2024) bahwa DAK berperan penting dalam memperkuat kemampuan fiskal daerah dan memperluas ruang fiskal untuk pembangunan ekonomi lokal.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH memiliki nilai koefisien 0,249 dengan $t = 0,248$ dan signifikansi 0,807 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah positif tetapi tidak signifikan. Rendahnya signifikansi DBH disebabkan oleh keterbatasan kapasitas Jombang sebagai daerah non-penghasil sumber daya alam, sehingga nilai bagi hasil yang diterima dari pajak pusat maupun sumber daya alam relatif kecil. Hasil ini mendukung temuan Siregar et al. (2023) yang menyatakan bahwa DBH lebih signifikan di daerah penghasil minyak, gas, atau batubara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dua variabel transfer fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), memiliki pengaruh

signifikan terhadap belanja daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) meskipun berpengaruh positif, tidak terbukti memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat belanja pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa struktur fiskal Kabupaten Jombang masih didominasi oleh ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, karakteristik *transfer dependent* masih sangat kuat tercermin dalam pola pengelolaan keuangan daerah, di mana belanja pemerintah lebih responsif terhadap perubahan alokasi DAU dan DBH dibandingkan dengan kemampuan PAD.

Kondisi tersebut semakin mempertegas keberadaan fenomena *flypaper effect*, yaitu kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih cepat membelanjakan dana yang bersumber dari transfer pusat daripada meningkatkan kapasitas PAD-nya sendiri. Flypaper effect ini lazim ditemukan pada daerah dengan basis ekonomi yang belum cukup kuat atau memiliki elastisitas penerimaan daerah yang rendah. Pada konteks Jombang, hasil penelitian menunjukkan kecenderungan tersebut masih berlangsung, menandakan bahwa stimulus fiskal dari pusat menjadi faktor dominan dalam mendorong realisasi belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan temuan empiris di berbagai penelitian terdahulu, pola ini konsisten dengan hasil yang



dilaporkan oleh Eliana et al. (2023), Syafira Putri & Kurnia (2024), serta beberapa studi sebelumnya yang menyimpulkan bahwa DAU dan DBH merupakan faktor utama yang memengaruhi alokasi belanja daerah di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Umumnya, belanja pemerintah daerah lebih sensitif terhadap besaran transfer fiskal dibandingkan PAD, mengingat struktur pendapatan lokal yang masih terbatas. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik banyak daerah di Indonesia yang masih berada pada fase ketergantungan fiskal akibat rendahnya kapasitas pemungutan pendapatan asli daerah.

Sementara itu, tidak signifikkannya pengaruh PAD menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah belum optimal. Idealnya, PAD menjadi sumber pendanaan yang mencerminkan kemandirian fiskal dan menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah. Namun dalam kasus Jombang, PAD belum mampu memainkan peran tersebut, sehingga belanja daerah menjadi kurang fleksibel ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional. Adapun tidak signifikkannya DAK dapat disebabkan oleh sifat DAK yang *earmarked*, yaitu penggunaannya telah ditentukan untuk program tertentu sehingga tidak secara langsung memengaruhi total belanja daerah secara agregat.

Temuan ini memberikan implikasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten

Jombang. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat dan memperkuat kemandirian fiskal, peningkatan kinerja PAD perlu diprioritaskan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan penerimaan. Dengan memperbaiki struktur PAD, Jombang dapat memperkuat stabilitas fiskalnya, meningkatkan ruang fiskal untuk belanja yang produktif, serta secara bertahap mengurangi risiko fiskal akibat ketergantungan pada transfer pusat.

D. Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Jombang sepanjang periode 2005–2024. Akan tetapi, pada pengujian parsial hanya DAU dan DAK yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan PAD dan DBH meskipun bernilai positif tidak menunjukkan signifikansi. Nilai R^2 yang cukup besar menunjukkan bahwa variasi belanja daerah sebagian besar dijelaskan oleh pendapatan daerah yang komposisinya masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. Temuan tersebut memperkuat indikasi adanya



flypaper effect, yakni kondisi ketika belanja daerah lebih dipengaruhi oleh dana transfer daripada kemampuan PAD itu sendiri, sehingga tingkat kemandirian fiskal belum berkembang sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka desentralisasi fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas PAD melalui langkah-langkah seperti intensifikasi penerimaan pajak, pemanfaatan aset daerah secara optimal, serta pencarian sumber-sumber pendapatan baru. Selain itu, alokasi belanja perlu diarahkan pada sektor-sektor yang bersifat produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap kajian fiskal daerah dan merekomendasikan penelitian lanjutan dengan memasukkan variabel seperti Dana Insentif Daerah (DID), belanja modal, serta indikator kinerja fiskal agar analisis yang dihasilkan lebih menyeluruh.

E. Daftar Pustaka

- Aldo Yanuarto, Muhammad Syahbintang Maesa Putra, & Novita Angraeni. (2024). Optimalisasi Distribusi Dana APBN Ke Daerah Otonom. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.387>
- Anggela Setiya Putri, Riko Setya Wijaya, & Putra Perdana. (2025). Analisis Pengaruh Sektor Industri Terhadap Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kediri. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 1-18. <https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.2859>
- Anisah, K., & Naila Najihah. (2025). Pengaruh Brand Awareness Dan Brand Image Terhadap Keputusan Investasi Di Bank Bri. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 19-33. <https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.2772>
- Djauharotun Nafisah, & Arief Bachtiar. (2025). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Pesisir Selatan Jawa Timur. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 149-160. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3854>
- Eka Sulistya Anggraeni, & Niniek Imaningsih. (2025). Klasifikasi Daerah Dan Pengaruh Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Grobogan. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 34-46. <https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.2934>
- Eliana, Astuti, I. N., Ivana, F., Kesuma, I., Mediyanti, S., & Jannah, D. R. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2017-2020. *Andrew's Disease of*



- the Skin Clinical Dermatology.*, 12(2), 615–622.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers From the Central Government To Provincial Regions in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 14(1), 54–64. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 5(3), 1–17.
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.217>
- Indah Susilowati, Yeremia Petra, Talenta Vena Insani, Tegar Hermawan, Yasmien Mumtaz Azzahra, & Penesta Tia Tira Sinulingga. (2025). Determinan Adopsi Digital Banking Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Pendekatan Regresi Logistik. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 61-76. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3028>
- Jannah, H. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1–19.
- Kusumaningrum, A. P., & Ekbal Santoso. (2025). Pengaruh Persepsi Trend Make Up Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Mea Dacosta Tulungagung. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 77-93. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3036>
- Laia, B., Midarwati Gaurifa, Raihfan Trielman Lature, Fransiskus Gaurifa, Tatema Telambanua, & Selfi Yanti Bali. (2025). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Tari Baluse: Peran Kearifan Lokal Nias Selatan Di Desa Wisata Hilimondregeraya. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 134-148. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3698>
- Novie Wijaya, Rafi Ohorella, Meilya Suzan Triyastuti, & Retno Dwi Jayanti. (2025). Pengaruh Analisis Internal



- Dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 94-105. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.2657>
- Oates. (1972). Fiscal Federalism. *Public Expenditure*, 252-294. <https://doi.org/10.4324/9781315127712-8>
- Pingkan Syabila Tri Indiaty, Kiky Asmara, & Fauzatul Laily Nisa. (2025). Analisis Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Probolinggo. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 120-133. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3247>
- Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner*, 6(2), 1412-1425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.765>
- Rezananda Ramadina, & Nurul Hidayah. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Dimoderasi Dengan Ukuran Perusahaan. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 47-60. <https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.2965>
- Richard A. Musgrave, P. B. M. (1989). *Public Finance In Theory And Practice*. <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Santika, D. A., Eurolia, R. Y., Hasanuddin, M. A., Rania, R. F., & Meisaroh, D. (2025). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(02), 249-260.
- Siregar, I. F., Batubara, R. F., Hutapea, R. S., & Rahmawati, S. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan (2011-2022). *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 390-399. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.668>
- Syafira Putri, W., & Kurnia. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Wulandari, E., Devi, I. S., Azis, A., Islam, F. A., Studi, P., Agama, P., & Karawang, S. (2025). Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Desentralisasi.